

# PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



## LAPORAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

BAPPEDALITBANG KAB. KOTAWARINGIN BARAT  
JL. H.M. RAF'I NO. 3, PANGKALAN BUN

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2023.

Penyusunan laporan ini didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Daerah. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian indeks pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Kami menyadari bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang krusial dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan laporan ini dilakukan secara cermat dan komprehensif, dengan mengacu pada data dan informasi yang akurat dan valid.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, antara lain: Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, dan Sekretariat Daerah.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang lebih baik dan akuntabel.

Pangkalan Bun, 31 Desember 2024.

Kepala Bappedalitbang  
Kabupaten Kotawaringin Barat,

TTD

**Prof. Dr. Ir. JUNI GULTOM, ST, MTP**

DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Tujuan Penulisan.....	2
<b>BAB II METODOLOGI PENGUKURAN IPKD</b> .....	<b>3</b>
A. Sumber Data dan Informasi .....	3
B. Dimensi Pengukuran dan Indikator Penilaian .....	3
<b>BAB III HASIL PENGUKURAN DAN ANALISIS</b> .....	<b>5</b>
A. Hasil Penginputan IPKD .....	5
B. Analisis Dimensi .....	8
C. Analisis Tren IPKD.....	9
D. Perbandingan dengan Kabupaten/Kota Lain.....	13
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>14</b>
A. Kesimpulan .....	14
B. Saran.....	14
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>15</b>
A. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024, Tanggal 12 Desember 2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023 .....	15
B. Tangkapan Layar dan Data Dukung Dimensi 1 .....	15
C. Tangkapan Layar dan Data Dukung Dimensi 2 .....	15
D. Tangkapan Layar dan Data Dukung Dimensi 3 .....	15
E. Tangkapan Layar dan Data Dukung Dimensi 4 .....	15
F. Tangkapan Layar dan Data Dukung Dimensi 5 .....	15
G. Tangkapan Layar dan Data Dukung Dimensi 6 .....	15

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Sub Dimensi 1.1 s.d. Sub Dimensi 1.5 di Dimensi 1 IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023.....	8
Grafik 3.2	<i>Mandatory Spending</i> di Dimensi 2 IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023.....	9
Grafik 3.3	Rincian Data Dukung di Dimensi 3 IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023.....	9
Grafik 3.4	Rincian Data Dukung di Dimensi 4 IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023.....	10
Grafik 3.5	Rincian Data Dukung di Dimensi 5 IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023.....	11
Grafik 3.6	Rincian Data Dukung di Dimensi 6 IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021-2023.....	11
Grafik 3.7	Tren Nilai IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018-2023 .....	13

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	Rincian Hasil Penginputan Data Pada Dimensi 1 IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023.....	5
Tabel 3.2	Rincian Hasil Penginputan Data Pada Dimensi 2 IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023.....	6
Tabel 3.3	Rincian Hasil Penginputan Data Pada Dimensi 3 dan 4 IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023 .....	6
Tabel 3.4	Rincian Hasil Penginputan Data Pada Dimensi 5 IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023.....	7
Tabel 3.5	Tabel 3.5 Rincian Hasil Penginputan Data Pada Dimensi 6 IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 .....	7
Tabel 3.6	Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018-2023.....	12

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan proses yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah secara objektif, Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). IPKD menjadi alat evaluasi yang memberikan gambaran menyeluruh atas kinerja tata kelola keuangan daerah. Hal ini juga bertujuan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengukuran IPKD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Daerah, yang menggunakan 6 (enam) dimensi utama sebagai alat ukur, yaitu: (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; (2) Pengalokasian anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah; (4) Penyerapan anggaran; (5) Kondisi keuangan daerah; dan (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki nilai IPKD terbaik per kategori fiskal dan per daerah, berdasarkan 3 (tiga) kategori kondisi pengelolaan keuangan daerah, yakni kategori Baik (A), Perlu Perbaikan (B), dan Sangat Perlu Perbaikan (C). Pemerintah Daerah yang kondisi pengelolaan keuangannya masih sangat perlu perbaikan atau fiskal rendah dapat melakukan *maintenance*.

### B. Dasar Hukum

Penyusunan laporan IPKD ini dilaksanakan berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor: 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

### **C. Tujuan Penulisan**

Penyusunan laporan IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2024 memiliki beberapa tujuan strategis:

1. Mengukur dan mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif dengan menggunakan parameter dan indikator yang terukur.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret dan applicable untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Mendorong implementasi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah.
5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah kepada pemangku kepentingan.

## BAB II METODOLOGI PENGUKURAN IPKD

### A. Sumber Data dan Informasi

Penginputan data untuk pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) menggunakan sumber data yang relevan dan valid mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020. Sumber data tersebut berasal dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (Bappelitbangda) Kabupaten Kotawaringin Barat:
  - a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD); dan
  - b. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kotawaringin Barat:
  - a. Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  - c. Realisasi Anggaran.
  - d. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat:
  - a. Data keterbukaan informasi publik, termasuk publikasi dokumen pengelolaan keuangan melalui situs resmi pemerintah daerah atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
4. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat:
  - a. Rekapitulasi Data Pengadaan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)

Untuk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024, berbagai dokumen yang ditinjau yakni: (1) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026, (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023, (3) Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS-P) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023, (4) Perubahan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023, (5) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023, (6) Opini BPK atas LKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 hingga Tahun 2023, dan (7) *Screenshot* Rekapitulasi Data Pengadaan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.

### B. Dimensi Pengukuran dan Indikator Penilaian

Pengukuran dan penilaian IPKD dilakukan melalui 6 (enam) dimensi yang saling terkait Dimana setiap dimensi memiliki indikator-indikator spesifik dengan bobot penilaian sebagai berikut:

1. Perencanaan.
  - a. Kesesuaian nomenklatur program antara RPJMD dan RKPD (6%).
  - b. Kesesuaian nomenklatur program antara RKPD dan KUA-PPAS (6%).
  - c. Kesesuaian nomenklatur program antara KUA-PPAS dan APBD (6%).
  - d. Kesesuaian pagu program antara RPJMD dan RKPD (6%).
  - e. Kesesuaian pagu program antara RKPD dan KUA-PPAS (6%).
  - f. Kesesuaian pagu program antara KUA-PPAS dan APBD (6%).
2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, yaitu:
  - a. Alokasi belanja fungsi pendidikan minimal 20%.
  - b. Alokasi belanja urusan kesehatan minimal 10%.
  - c. Alokasi belanja infrastruktur minimal 25% dari Dana Transfer Umum (DTU).
  - d. Alokasi belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
  - a. Ketepatan waktu pengunggahan dokumen, maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.
  - b. Keteraksesan dokumen yang dapat diunduh publik selama 2 (dua) tahun anggaran.  
Salah satu dokumen yang diminta untuk diunggah adalah data pengadaan pada SiRUP.
4. Penyerapan Anggaran, yaitu:
  - a. Persentase realisasi anggaran untuk belanja operasional.
  - b. Persentase realisasi anggaran untuk belanja modal.
  - c. Persentase realisasi anggaran untuk belanja transfer.
  - d. Persentase realisasi anggaran untuk belanja tak terduga.
5. Kondisi Keuangan Daerah, yaitu:
  - g. Kemandirian keuangan.
  - h. Solvabilitas jangka panjang, pendek, dan layanan.
  - i. Fleksibilitas keuangan.
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu: status opini BPK atas LKPD selama 3 (tiga) tahun terakhir.

### BAB III HASIL PENGUKURAN DAN ANALISIS

#### A. Hasil Penginputan IPKD

Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 telah dilakukan berdasarkan 6 (enam) dimensi utama sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2020. Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024, Tanggal 12 Desember 2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023 bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada Kategori Kabupaten, dengan kemampuan Fiskal “**Sedang**”, mendapatkan nomor 2, dengan indeks 83,025 yang artinya berhak mendapatkan peringkat “**Baik**” dan Nilai “**A**” (data terlampir).

**Tabel 3.1 Rincian Hasil Penginputan Data Pada Dimensi 1 IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023**

DIMENSI 1							
RPJMD		RKPD		KUA-PPAS		APBD	
Data	Surat Pernyataan	Data	Surat Pernyataan	Data	Surat Pernyataan	Data	Surat Pernyataan
V (2023- 2026) 208 Program	V	V 210 Program	V	V 210 Program	V	V 210 Program	V

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (2024).

Keterangan:  
V = terpenuhi

Interpretasi hasil inputan data di Dimensi 1 (Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran) adalah:

1. Jumlah program pada RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 sebanyak 208 (dua ratus delapan) dan jumlah program pada RKPD Perubahan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 sebanyak 210 (dua ratus sepuluh). Artinya, 208 (dua ratus delapan) konsisten dengan jumlah program dan pagu program, namun 2 (dua) program tambahan di tahapan RKPD menyebabkan inkonsistensi keselarasan dokumen RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 dengan dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.
2. Jumlah program dan pagu program pada RKPD Perubahan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 yang sama dengan program pada KUA-PPAS Perubahan Tahun 2023 sebanyak 210 (dua ratus sepuluh). Artinya, tercipta konsistensi keselarasan dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 dengan dokumen KUA-PPAS Perubahan Tahun 2023.
3. Jumlah program dan pagu program pada KUA-PPAS Perubahan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 yang sama dengan program pada APBD Perubahan Tahun 2023 sebanyak 210 (dua ratus sepuluh). Artinya, tercipta konsistensi keselarasan dokumen KUA-PPAS Perubahan Tahun 2023 dengan dokumen APBD Perubahan Tahun 2023.

**Tabel 3.2 Rincian Hasil Penginputan Data Pada Dimensi 2 IPKD  
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023**

<b>DIMENSI 2</b>				
<b>Pendidikan</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>Infrastruktur</b>	<b>Standar Pelayanan Minimal (SPM)</b>	<b>Surat Pernyataan</b>
V	V	V	V	V
			1 (satu) jenis pelayanan dasar SPM tidak dianggarkan	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (2024).

Keterangan:

V = terpenuhi

Interpretasi hasil inputan data di Dimensi 2 (Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD) menunjukkan bahwa:

1. anggaran dan program untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur telah dialokasikan dengan baik (data terlampir), dengan porsi belanja urusan:
  - a. Pendidikan sebesar 20% dari total APBD Perubahan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023,
  - b. Kesehatan sebesar 10% dari total APBD Perubahan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023, dan
  - c. Infrastruktur sebesar 25% dari Dana Transfer Umum (DTU).
2. terdapat 1 (satu) jenis pelayanan dasar SPM tidak dianggarkan, yaitu pelayanan informasi rawan bencana untuk Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (data terlampir).

**Tabel 3.3 Rincian Hasil Penginputan Data Pada Dimensi 3 dan 4  
IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023**

<b>DIMENSI 3</b>	<b>DIMENSI 4</b>
Sudah input 29 dokumen *cek per 13 spt 19.30	V

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (2024).

Keterangan:

V = terpenuhi

Berdasarkan Tabel 3.3, untuk Dimensi 3 (Transparansi Keuangan Daerah) diperoleh hasil sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dokumen telah diunggah dan diverifikasi bahwa semua dokumen tersebut terbuka untuk umum (dapat dilihat dan diunduh dari laman Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (<https://portal.kotawaringinbaratkab.go.id/>)) dan tidak ada yang tanggal unggah dokumennya lewat dari 30 (tiga puluh hari) dari tanggal penetapan dokumen tersebut (data terlampir).

Sedangkan Dimensi 4 (Penyerapan Anggaran) cukup tinggi. Dilihat dari pemenuhan 4 (empat) aspek belanja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyerapan: anggaran meliputi belanja Operasional, Modal, Tidak Terduga, dan Transfer. Kabupaten Kotawaringin Barat mampu merealisasikan Belanja Operasional sebesar 93,776%, Belanja Modal sebesar 97,757%, Belanja Operasional sebesar 78,587%, dan Belanja Transfer sebesar 97,577% (data terlampir).

**Tabel 3.4 Rincian Hasil Penginputan Data Pada Dimensi 5  
IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023**

<b>DIMENSI 5</b>															
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (2024).

Keterangan:

1. Klaster yang input (Sesuai/Tidak sesuai)
  2. Lampiran
  3. Total PAD (LRA)
  4. Total Pendapatan (LRA)
  5. Pendapatan DAK (LRA)
  6. Total Kewajiban (Neraca)
  7. Belanja Pegawai (LRA)
  8. Total Pendapatan LO (LO)
  9. DAK LO (LO)
  10. Total Beban LO (LO)
  11. Kas dan Setara Kas (Neraca)
  12. Investasi Jangka Pendek (Neraca)
  13. Kewajiban Jangka Pendek (Neraca)
  14. Total Asset Tetap (Neraca)
  15. Kewajiban Jangka Panjang (Neraca)
  16. Jumlah Penduduk
- V = terpenuhi

Interpretasi hasil inputan data di Dimensi 5 (Kondisi Keuangan Daerah) menunjukkan performa yang sangat baik dalam pemenuhan indikator keuangan (data terlampir), bahwa:

1. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan, dan Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 telah dilaporkan secara lengkap dan telah di-*audited* oleh BPK RI.
2. Data Kewajiban, Pendapatan, dan DAK Laporan Operasional (LO) telah dilaporkan secara lengkap dan telah di-*audited* oleh BPK RI.
3. Likuiditas daerah (kas, deposito, atau aset likuid lainnya), Investasi Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Pendek, dan Asset Tetap serta Kewajiban Jangka Panjang pada Neraca telah dilaporkan secara lengkap dan telah di-*audited* oleh BPK RI.
4. Nilai data tersebut sesuai (imbang) antara pendapatan dan pembiayaan.

**Tabel 3.5 Rincian Hasil Penginputan Data Pada Dimensi 6  
IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023**

<b>DIMENSI 6</b>		
<b>Tahun Anggaran 2021</b>	<b>Tahun Anggaran 2022</b>	<b>Tahun Anggaran 2023</b>
V	V	V
*cek per 13 spt 16.25		

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (2024).

Keterangan:

V = terpenuhi

Dimensi 6 (Opini BPK atas LKPD) menunjukkan kelengkapan pemenuhan indikator opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (Tahun Anggaran 2021, 2022, dan 2023) (data terlampir).

## B. Analisis Dimensi

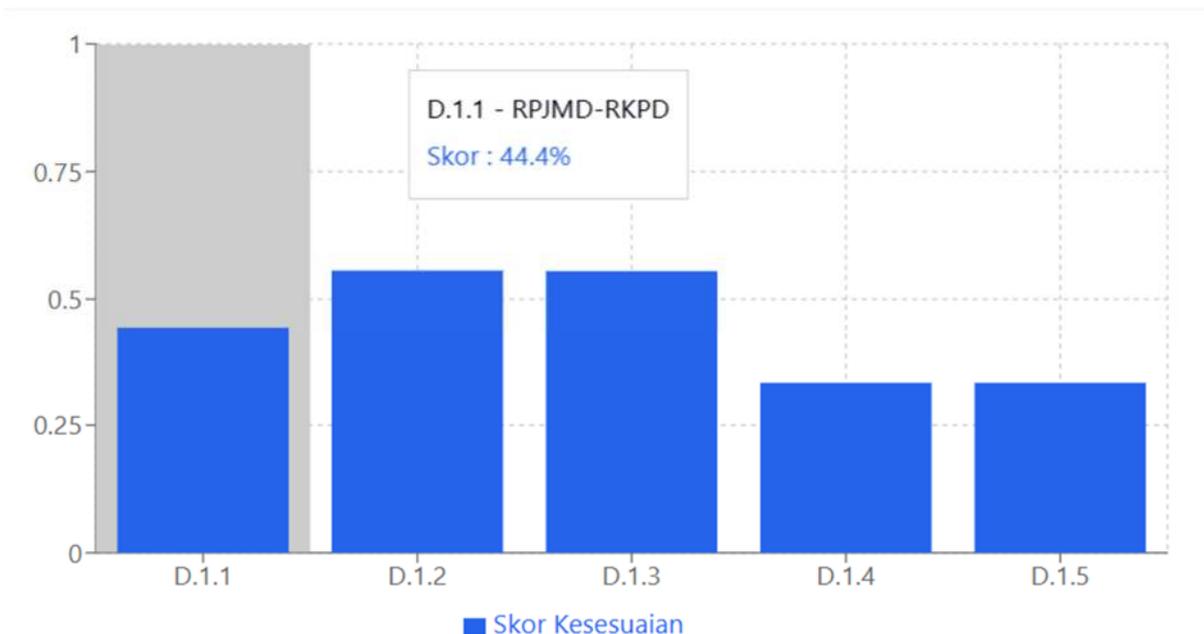
Kabupaten Kotawaringin Barat memenuhi sebagian besar kriteria IPKD pada hampir semua dimensi. Namun, terdapat catatan khusus pada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa temuan kunci yang perlu digarisbawahi:

### 1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pengelolaan dokumen perencanaan dan penganggaran Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi. Dokumen seperti RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD telah disusun secara konsisten sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

- Kesesuaian pagu program (D.1.4 dan D.1.5) yang masih rendah (0.333)
- Kesesuaian RPD dan RKPD (D.1.1) yang perlu ditingkatkan dari 0.444
- Konsistensi nomenklatur program antar dokumen perencanaan

**Grafik 3.1 Sub Dimensi 1.1 s.d. Sub Dimensi 1.5 di Dimensi 1 IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023**

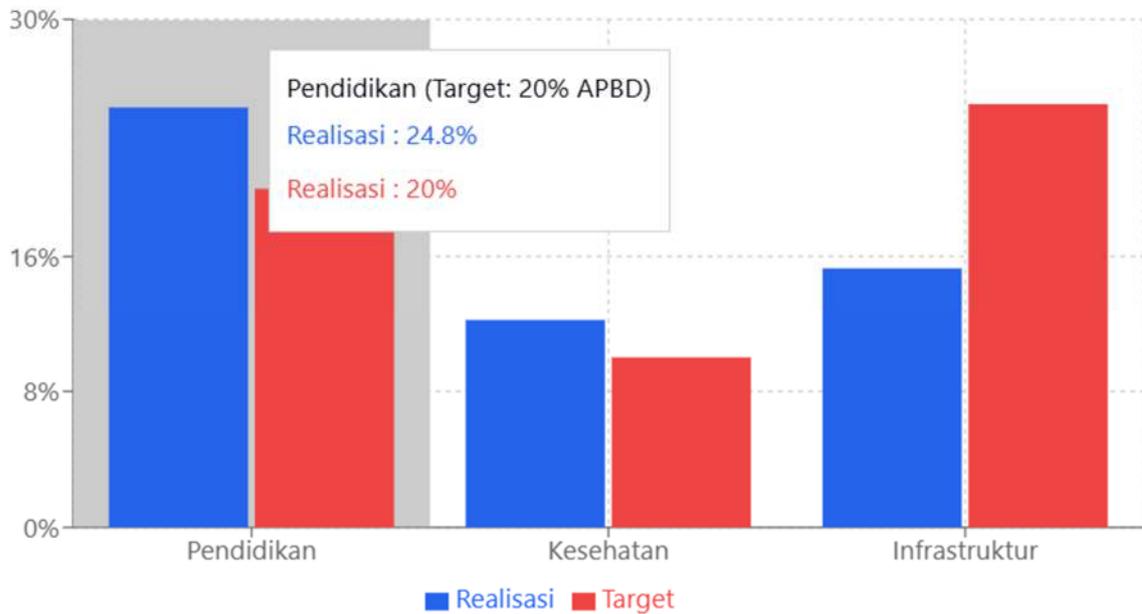


Sumber : Data Diolah Tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (2024).

### 2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

- Indikator alokasi belanja untuk pendidikan dan kesehatan terpenuhi sesuai ketentuan, dan melampaui target minimal.
- Infrastruktur dapat menjadi fokus perbaikan dalam perencanaan anggaran periode berikutnya karena realisasi 15.3% dari Dana Transfer Umum belum mencapai target minimal.

**Grafik 3.2 Mandatory Spending di Dimensi 2 IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023**

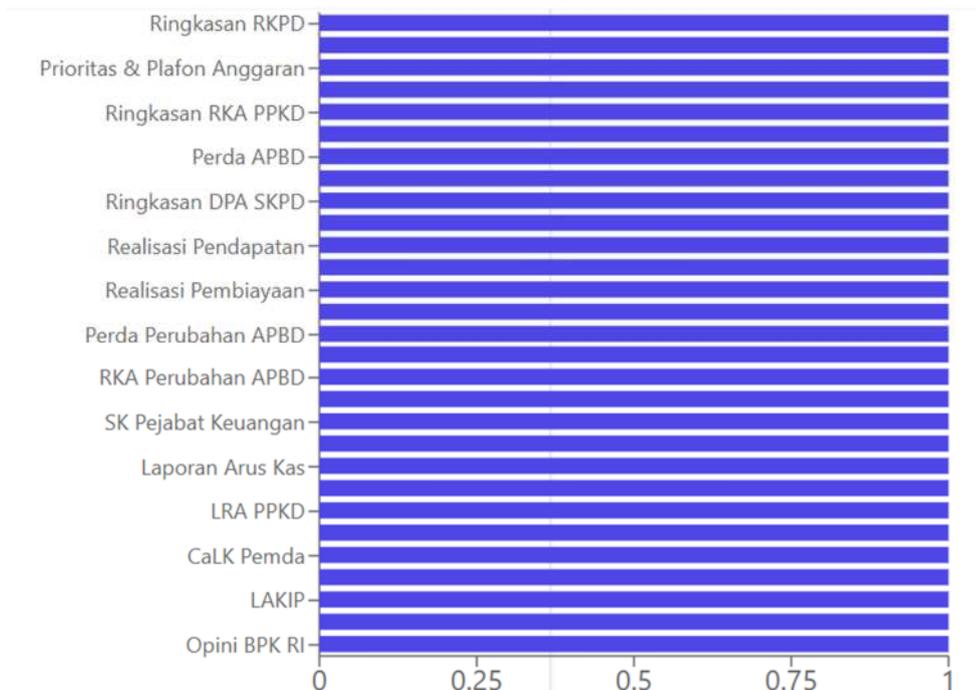


Sumber : Data Diolah Tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (2024).

3. **Transparansi Keuangan Daerah**

Tingkat publikasi dokumen pemerintah daerah tepat waktu dan aksesibilitas dokumen mencapai 100% dilihat dari 29 (dua puluh sembilan) jenis dokumen yang diminta.

**Grafik 3.3 Rincian Data Dukung di Dimensi 3 IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023**



Sumber : Data Diolah Tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (2024).

4. Penyerapan Anggaran

Rata-rata penyerapan anggaran sebesar 82.75%, dengan belanja operasional dan belanja transfer sebagai penyumbang utama.

- a. Semua jenis belanja telah melampaui nilai ambang batas yang digunakan untuk menganalisis data (*threshold*) minimal 80%
- b. Penyerapan tertinggi ada pada Belanja Operasional (85%)
- c. Penyerapan terendah ada pada Belanja Tidak Terduga (81%)
- d. Rentang penyerapan cukup konsisten dengan selisih tertinggi dan terendah hanya 4%

**Grafik 3.4 Rincian Data Dukung di Dimensi 4 IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023**



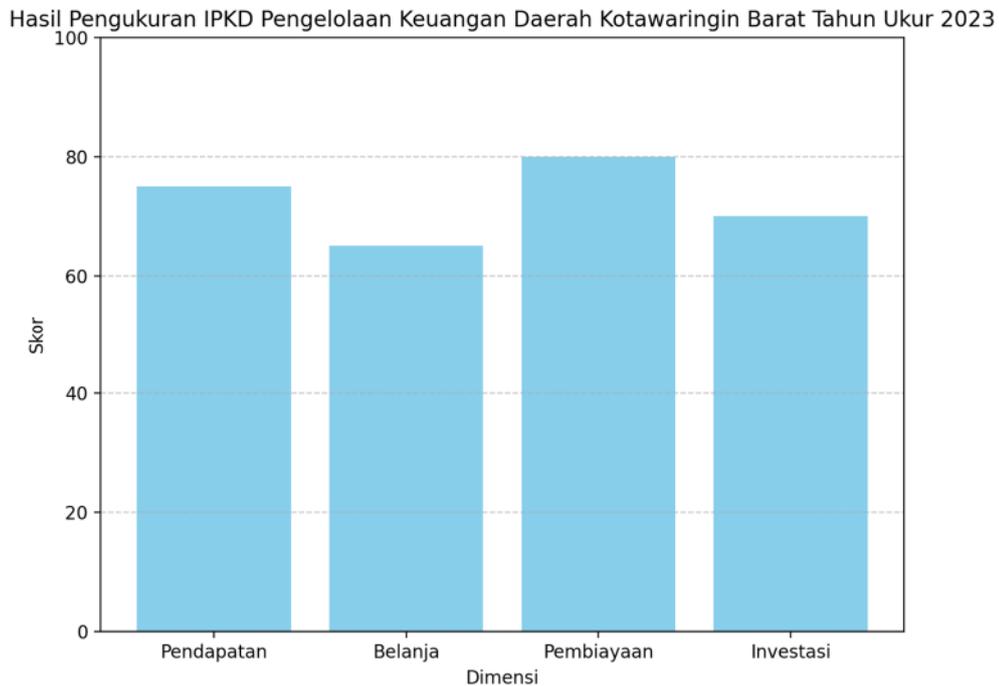
Sumber : Data Diolah Tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (2024).

5. Kondisi Keuangan Daerah

Keseimbangan fiskal daerah masih berada pada kategori sedang, dengan kemandirian keuangan daerah sebesar 16,06% yang menunjukkan tingkat ketergantungan tinggi pada pendapatan transfer (di bawah 25% tergolong rendah).

- a. Pendapatan daerah yang tinggi seharusnya berkontribusi pada kemandirian keuangan. Namun, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah dibandingkan dengan transfer pusat, maka indeks kemandirian keuangan tetap rendah.
- b. Jika belanja daerah lebih banyak berasal dari dana transfer pusat dibandingkan dari PAD, maka tingkat kemandirian keuangan akan rendah. Ini dapat menjelaskan mengapa kemandirian hanya 16,065 meskipun belanja cukup tinggi.
- c. Pembiayaan yang tinggi biasanya menunjukkan upaya daerah dalam mencari sumber dana lain, misalnya melalui pinjaman atau penerbitan obligasi. Jika pembiayaan ini lebih banyak berasal dari utang atau dana pusat, maka tidak langsung meningkatkan kemandirian.
- d. Investasi yang cukup tinggi dapat menunjukkan upaya daerah untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Namun, jika investasi belum berkontribusi signifikan pada peningkatan PAD, dampaknya terhadap kemandirian masih terbatas

**Grafik 3.5 Rincian Data Dukung di Dimensi 5 IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023**

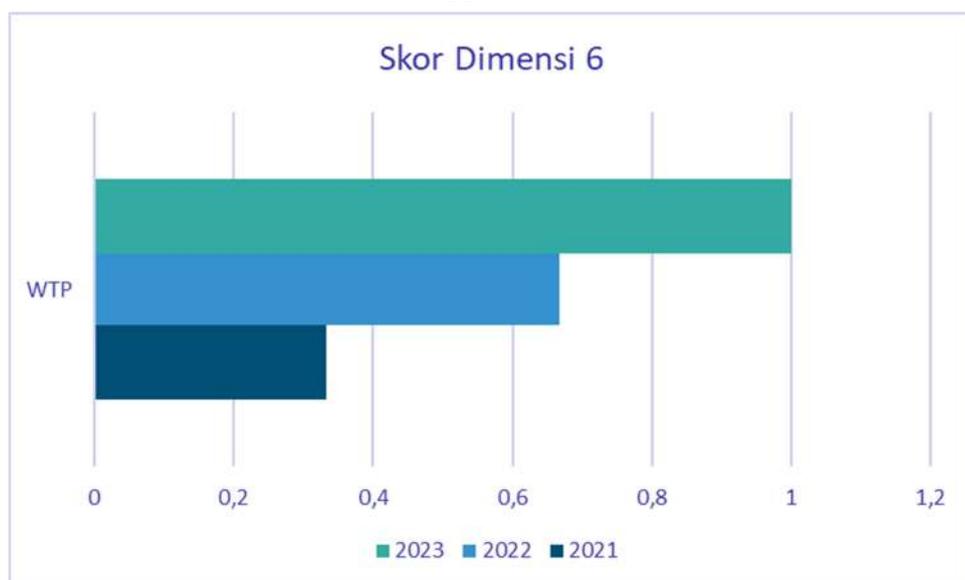


Sumber : Data Diolah Tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (2024).

6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Kabupaten Kotawaringin Barat berhasil mempertahankan opini WTP selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

**Grafik 3.6 Rincian Data Dukung di Dimensi 6 IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021-2023**



Sumber : Data Diolah Tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (2024).

### C. Analisis Tren IPKD

Nilai IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam 5 (lima) tahun terakhir, mencerminkan keberhasilan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Tabel berikut menunjukkan nilai IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat selama 6 (enam) tahun terakhir:

**Tabel 3.6 Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat  
Tahun Anggaran 2018-2023**

Tahun	Dimensi						Nilai IPKD	Peringkat	Nilai	Kategori Fiskal
	1	2	3	4	5	6				
2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	76,554	Baik	A	Sedang
2019	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	58,563	Perlu Perbaikan	B	Sedang
2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	73,506	Perlu Perbaikan	B	Sedang
2021	7,346	14,483	0	15	0	15	51,829	Sangat Perlu Perbaikan	C	Sedang
2022	0,062	14,31	15	20	3,262	15	67,635	Perlu Perbaikan	B	Sedang
2023	13,129	19,828	15	15	5,069	15	83,025	Baik	A	Sedang

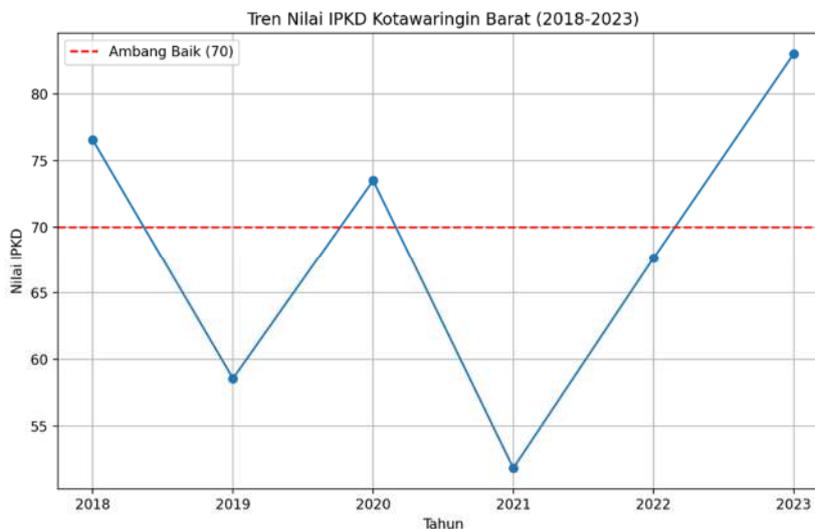
Sumber : Data diolah peneliti dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah (2021 dan 2022) dan Badan Strategi dan Kebijakan Dalam Negeri (2023 dan 2024).

Berdasarkan data hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Kabupaten Kotawaringin Barat, kita dapat mencatat beberapa trend dan pola utama:

1. Tren Umum Nilai IPKD:
  - a. Pada tahun 2018, IPKD tercatat sebesar 76,554 dengan kategori fiskal Baik.
  - b. Pada tahun 2019, terdapat penurunan skor menjadi 58,563 meskipun kategori fiskal berubah menjadi Perlu Perbaikan.
  - c. Tahun 2020 menunjukkan peningkatan nilai menjadi 73,506, namun peringkat fiskal masih berada pada kategori Perlu Perbaikan.
  - d. Tahun 2021 mengalami penurunan signifikan, di mana IPKD turun ke 51,829 dengan penilaian sangat perlu perbaikan (peringkat C).
  - e. Pada tahun 2022 terjadi perbaikan, dengan IPKD naik ke 67.635 dan kembali ke kategori Perlu Perbaikan (peringkat B).
  - f. Tahun 2023 menampilkan kinerja terbaik dengan IPKD mencapai 83,025, mengindikasikan peningkatan ke kategori fiskal Baik (peringkat A).
2. Analisis Per Dimensi (tersedia data komponen mulai 2021):
  - a. Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Pengalokasian Anggaran, Transparansi Keuangan, Penyerapan Anggaran, dan Kondisi Keuangan mulai diukur secara terpisah dari tahun 2021.
  - b. Pada tahun 2021, terdapat nilai rendah di beberapa dimensi (misalnya nilai "0" pada transparansi dan kondisi keuangan), yang bisa menunjukkan area perbaikan dalam pengelolaan dokumen dan optimalisasi anggaran.
  - c. Pada tahun 2022, meskipun sebagian dimensi tetap rendah (contoh: Kesesuaian Dokumen menunjukkan nilai sangat rendah yaitu 0,062), terdapat perbaikan di sejumlah aspek seperti Penyerapan Anggaran (naik ke 20) dan Kondisi Keuangan (naik ke 3,262) yang mulai menggerakkan skor IPKD ke atas.

- d. Tahun 2023 menunjukkan perbaikan yang lebih jelas di hampir seluruh dimensi, dengan penambahan nilai yang signifikan pada Kesesuaian Dokumen (13,129) dan Pengalokasian Anggaran (19,828). Hal ini mengindikasikan peningkatan dalam kualitas pengelolaan keuangan daerah secara holistik.
3. Interpretasi Umum:
- Terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan penurunan di 2019 dan 2021 diikuti dengan pemulihan di 2020, 2022, dan paling optimal pada 2023.
  - Peningkatan di 2023 menunjukkan respons positif terhadap perbaikan proses pengelolaan keuangan dan implementasi kebijakan fiskal yang lebih efektif.
  - Nilai komponen per dimensi yang semakin meningkat menandakan bahwa aspek-aspek operasional seperti perencanaan, penganggaran, dan transparansi mulai mendapatkan perhatian lebih dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.

**Grafik 3.7 Tren Nilai IPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018-2023**



Sumber : Data Diolah Tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (2024).

#### **D. Perbandingan dengan Kabupaten/Kota Lain**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024, Tanggal 12 Desember 2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023 dan jika dibandingkan dengan daerah lain, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai posisi:

- Nomor 2 pada kategori Kabupaten/Kota dengan Fiskal Sedang dan di atas nilai rata-rata di kategori tersebut, yaitu 73,76.
- Di atas semua kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan Fiskal Rendah.
- Di atas semua kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan Fiskal Sedang.
- Di atas semua kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan Fiskal Tinggi.
- Di atas Kota Palangka Raya yang mempunyai Fiskal Rendah.
- Di atas Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai Fiskal Tinggi.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis dalam laporan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kabupaten Kotawaringin Barat berhasil mencapai kategori "Baik" (A) dengan skor IPKD 83,025, mencerminkan peningkatan signifikan dalam tata kelola keuangan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir.
2. Kekuatan utama terletak pada transparansi pengelolaan keuangan (100% dokumen terunggah tepat waktu), penyerapan anggaran yang tinggi (rata-rata 82,75%), dan opini WTP dari BPK selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
3. Kelemahan kritis meliputi ketidaksesuaian pagu program antar dokumen perencanaan (Dimensi 1), alokasi infrastruktur yang hanya 15,3% dari Dana Transfer Umum (belum mencapai target 25%), serta 1 (satu) jenis pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum dianggarkan, yaitu pelayanan informasi rawan bencana.

### B. Rekomendasi

Beberapa hal yang mungkin dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (dengan digawangi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah, dan Sekretariat Daerah) untuk meningkatkan nilai indeks pengelolaan keuangan daerah:

1. Rekomendasi jangka pendek (periode 1 (satu) tahun), yaitu:
  - a. Membentuk tim lintas OPD untuk merevisi ketidaksesuaian nomenklatur dan pagu program antara RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD.
  - b. Melakukan verifikasi data berkala guna memastikan konsistensi antar dokumen.
  - c. Menganggarkan pelayanan informasi rawan bencana (urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah) pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2025 atau di perubahannya.
  - d. Mengadakan pelatihan teknis bagi staf perencanaan dan keuangan terkait penyusunan dokumen yang sesuai standar Permendagri No. 19/2020
2. Rekomendasi jangka menengah (periode 2-5 tahun), yaitu:
  - a. Meningkatkan alokasi belanja infrastruktur minimal 25% dari Dana Transfer Umum (DTU) melalui prioritas proyek strategis seperti jalan desa dan drainase.
  - b. Mengembangkan dashboard real-time untuk memantau kesesuaian dokumen, penyerapan anggaran, dan capaian SPM.
  - c. Memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi sektor pariwisata dan perkebunan..
3. Rekomendasi jangka panjang (periode 6-20 tahun), yaitu:
  - a. Membangun platform terpadu yang menghubungkan sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan pengawasan keuangan daerah berbasis artificial intelligence.
  - b. Mengembangkan skema public-private partnership (PPP) dan obligasi daerah untuk mendanai proyek infrastruktur skala besar.
  - c. Menyusun kebijakan fiskal jangka panjang yang berfokus pada pengurangan ketergantungan terhadap transfer pusat dan peningkatan efisiensi belanja.

LAMPIRAN

- A. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024, Tanggal 12 Desember 2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023

<https://drive.google.com/file/d/1VhzL3cD0yWqsg7KWeQQCa5YkVCw-o-wj/>

- B. Tangkapan Layar dan Data Dukung Dimensi 1

<https://drive.google.com/drive/folders/1JlYS5W49mqpUQNp1MaC1Ad4gTFFuSSsJ/>

- C. Tangkapan Layar dan Data Dukung Dimensi 2

<https://drive.google.com/drive/folders/1cJInZg0c02NaeYl-L8cnQBW3GaABZFAx/>

- D. Tangkapan Layar dan Data Dukung Dimensi 3

<https://drive.google.com/drive/folders/1tre76WPoiLUzNvFPAltOitzKhMEFdoIG/>

- E. Tangkapan Layar dan Data Dukung Dimensi 4

<https://drive.google.com/file/d/1VhzL3cD0yWqsg7KWeQQCa5YkVCw-o-wj/>

- F. Tangkapan Layar dan Data Dukung Dimensi 5

[https://drive.google.com/drive/folders/1\\_4Smv6CtxtJVhXbx81jqTcdWtL8x8tnk/](https://drive.google.com/drive/folders/1_4Smv6CtxtJVhXbx81jqTcdWtL8x8tnk/)

- G. Tangkapan Layar dan Data Dukung Dimensi 6

<https://drive.google.com/drive/folders/1QL8P595zbJz7ahuuzkWIKOT5aN1RZgFc/>